

EVALUASI RENJA TRIWULAN I 2022

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST

Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI Hal

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 1

1.3. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja 2

1.4. Program dan Kegiatan 9

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021..... 10

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja
dan Renstra 10

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/
Kegiatan Dalam Renja 15

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 16

BAB IV PENUTUP..... 17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2022 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III antara lain :

- a. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA (SATUAN) | TARGET/ PAGU |
|--|---|--------------|
| 3 | 4 | K |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip | 80 |
| | Survey Kepuasan Payananan Internal | 85% |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia | 14 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren Lainnya | 7 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen) | 7 |
| Kegiatan Administrasi Keuangan | Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan | 2 LAYANAN |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 24 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran | Jumlah laporan Bulanan/Triwulan/Semeteran yang disusun | 4 |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat layanan administrasi kepegawaian | 100% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum | 100% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100% |

| | | |
|---|---|---------------|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan | 100% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang daerah yang memadai | 10 Jenis |
| Pengadaan Mebel | Tingkat ketersediaan Mebel | 100% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang terlaksana | 2 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat | 100% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor | 100% |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan | Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | 100% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara | 100% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100% |
| | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) | 6.25 % |
| | Persentase Penyediaan Air Baku | 0% |
| | Rasio Layanan Irigasi (%) | 38.81 % |
| Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha) | 3000 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun (Dokumen) | 2 dokumen |
| Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pola dan Rencana PSDA | 1 dokumen |
| Pembangunan Polder/Kolam Retensi | Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha) | 0.9 Hektar |
| Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang normalisasi /restorasi/pemeliharaan sungai (Km) | 87 Km |
| Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelembagaan Pengelola SDA yang dibina dan diberdayakan | 1 Lembaga |
| Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola (Ha) | 2849 Hektar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Ha) | 500 Hektar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | luas jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha) | 663 Hektar |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Luasan daerah irigasi permukaan yang opsional dan dipelihara (Ha) | 686 Hektar |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Luas Daerah jaringan irigasi rawa yang Operasional dan di pelihara (Ha) | 1000 Hektar |
| Operasional Unit Pengelola Irigasi | Jumlah lembaga pengelola irigasi yang beoperasional(lembaga) | 1 lembaga |
| | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | 15,00 |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah SR Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | 750 |
| Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | Jumlah sambungan rumah (SR) SPAM yang ditingkatkan (unit) | 750 |
| | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak | 30,00 |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Jumlah rumah tangga yang terlayani oleh sistem persampahan regional | 144,00 |
| Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk | Jumlah sarana dan prasarana cubluk untuk pemicuan PHBS (KK) | 144 |
| | | |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN | Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%) | 3,80 |

| | | |
|--|--|------|
| Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan (dokumen) | 1,15 |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen penataan bangunan dan lingkungan (dokumen) | 2 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%) | 92% |
| Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan (Km) | |
| | Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan (Km) | |
| | Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan (Km) | |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan yang disusun (Dokumen) | 2,00 |
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan yang terbangun (km) | 850.99 km; 3802.86 m |
| Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar (Km) | 7,72 |
| Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi (km) | 1,66 |
| Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala (Km) | 2,58 |
| Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 850.99 km; 3802.86 m |
| Penggantian Jembatan | Panjang jembatan yang diganti (M) | 143 m |
| Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan Provinsi di Pulau Bangka yang dipelihara (km) | 3793,11 |
| | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | 65% |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi | Persentase sertifikasi tenaga ahli | 50.13 % |
| Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih (ORANG) | 60 orang |
| Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 100% |
| Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlaha Layanan data dan informasi jasa konstruksi untuk SIPJAKI | 3 layanan |
| | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%) | 100% |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah dokumen rencana tata ruang Procinsi yang ditetapkan | 1 dokumen |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi | 1 dokumen |
| Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah provinsi | 10 penyelenggaraan |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi | 4 pelanggaran |
| Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil koordinasi pelaksanaan penataan ruang | 6 rekomendasi |
| | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase rumah akibat bencana yang tertangani | 50,00 |
| Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan | 100,00 |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi yang diidentifikasi | 1000,00 |
| | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | 100,00 |
| Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman | 4,00 |
| Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi | 4 |
| | | |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan | 100% |
| Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan | 100% |
| Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 15000 Ha |
| | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD | 100% |
| Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD) | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum | 100% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%) | 100% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan | Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan | 100% |

| | | |
|--|--|------|
| Penggandaan | dan Penggandaan (%) | |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan (%) | 100% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%) | 100% |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%) | 100% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%) | 100% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%) | 100% |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan | Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%) | 100% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%) | 100% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%) | 100% |

1.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN III TAHUN 2022

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

| URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENJA |
|--|--|
| 3 | 3 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| | |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Kegiatan Administrasi Keuangan | Kegiatan Administrasi Keuangan |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| | |
|---|---|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |
| Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi |
| Pembangunan Polder/Kolam Retensi | Pembangunan Polder/Kolam Retensi |
| Normalisasi/Restorasi Sungai | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi |
| Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa |
| Operasional Unit Pengelola Irigasi | Operasional Unit Pengelola Irigasi |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |
| Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional |
| Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN |

| LINGKUNGAN | LINGKUNGAN |
|---|---|
| Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan | Penataan Bangunan dan Lingkungan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Survey Kondisi Jalan/Jembatan |
| Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan Menuju Standar |
| Rehabilitasi Jalan | Rehabilitasi Jalan |
| Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jalan |
| Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan |
| Penggantian Jembatan | Penggantian Jembatan |
| Pemeliharaan Rutin Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jembatan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi |
| Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi |
| Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi |
| Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
| Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi |
| Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |
| Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
| Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman |
| Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |
| Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |

| | |
|--|--|
| Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD) | Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD) |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dalam rencana strategis dan 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2022.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan I Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 6.647.060.984 (3,74%)** dari pagu **Rp. 177.603.639.168**. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan I dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlambat terbit, sehingga kepastian pelaksanaan anggaran terlambat.
2. Akibat dari telatnya DPA adalah proses persiapan dan perencanaan pengadaan terhambat karena SIPD Perencanaan yang sudah terkoneksi dengan SIRUP. RUP baru dapat di proses setelah DPA *fix* dan selesai. Hal ini mengakibatkan terlambatnya proses lelang pengadaan barang dan jasa.
3. Perubahan aturan penunjukan PPTK dan PPK mengharuskan perangkat daerah mempelajari Kembali aturan dan juga mengkaji terlebih dahulu dampak dan akibatnya sehingga SK PPK dan PPTK pun terlambat.
4. Ada perubahan penggunaan sistem penatausahaan keuangan yang tidak disertai pemberian pengetahuan kepada bagian keuangan. Hal tersebut menyebabkan terlambatnya proses pencairan keuangan sehingga terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan termasuk pemberian gaji dan tunjangan.
5. Gaji dan Tunjangan terlambat diberikan sehingga kinerja pegawai dan imunitasnya menurun. Pada masa penyebaran Covid-19 Omicron banyak pegawai yang terinfeksi sehingga pelaksanaan awal kegiatan di triwulan ini pun terlambat.
6. Kebijakan BAKUDA Provinsi terkait pemrosesan DAK pada dokumen anggaran menyebabkan terlambatnya proses lelang paket DAK.

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 6.647.060.984 (3,74%)** dari pagu **Rp. 177.603.639.168**. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

| NO | KODE | | | | | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN |
|----|------|----|----|------|----|--|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| | | | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan |
| | 1 | 03 | 1 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | 1 | 03 | 1 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | 1 | 03 | 1 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | 1 | 3 | 1 | 1.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------|----|--|
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | 1 | 3 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | 3 | 2 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 14 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi |
| | 1 | 3 | 2 | 1.02 | | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|------|----|---|
| | 1 | 3 | 2 | 1.02 | 8 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| | 1 | 3 | 2 | 1.02 | 10 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa |
| | 1 | 3 | 2 | 1.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| | 1 | 3 | 2 | 1.02 | 23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa |
| | 1 | 3 | 2 | 1.02 | 27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi |
| | 1 | 3 | 3 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
| | 1 | 3 | 3 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |
| | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 05 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan |
| | 1 | 3 | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
| | 1 | 3 | 5 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional |
| | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 02 | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk |
| | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN |
| | 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | 1 | 03 | 09 | 1.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan |
| | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Lembaran |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|------|----|--|
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 16 | Penggantian Jembatan |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan |
| | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
| | 1 | 03 | 11 | 1.01 | | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi |
| | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi |
| | 1 | 03 | 11 | 1.02 | | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi |
| | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi |
| | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 1.01 | | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi |
| | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |
| | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |
| | 1 | 4 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
| | 1 | 4 | 2 | 1.01 | | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|------|----|--|
| | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi |
| | 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| | 1 | 04 | 05 | 1.01 | | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman |
| | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman |
| | 2 | 10 | 5 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |
| | 2 | 10 | 5 | 1.01 | | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| | 2 | 10 | 05 | 1.01 | 02 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD) |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya |

| | | | | | | |
|--|---|----|----|------|----|--|
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
|--|---|----|----|------|----|--|

| INDIKATOR KINERJA (SATUAN) | TARGET/ PAGU | | | |
|---|--------------|----------------|---|--------|
| | | | | |
| 4 | K | Rp | K | % |
| Nilai Sakip | 80 | 31,554,662,635 | | |
| Survey Kepuasan Payananaan Internal | 85% | | | |
| Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia | 14 | 1,059,840,304 | 6 | 42.86% |
| Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren lainnya | 7 | 710,226,279 | 2 | 28.57% |
| Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen) | 7 | 349,614,025 | 4 | 57.14% |
| Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan | 2 LAYANAN | 24,101,226,162 | | 25.00% |
| Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 24 | 24,078,748,732 | 6 | 25.00% |
| Jumlah laporan Bulanan/Triwulan/Semeteran yang disusun | 4 | 22,477,430 | 1 | 25.00% |
| Tingkat layanan administrasi kepegawaian | 100% | 69,944,000 | 0 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 69,944,000 | 0 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum | 100% | 667,248,794 | 0 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 14,985,098 | 0 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor | 100% | 23,345,972 | 0 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 57,999,504 | 0 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 25,000,000 | 0 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan | 100% | 76,493,220 | 0 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 469,425,000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah barang daerah yang memadai | 10 Jenis | 1,105,854,201 | 0 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan Mebel | 100% | 167,874,627 | 0 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | 585,058,073 | 0 | 0.00% |
| jumlah gedung kantor yang terlaksana | 2 | 352,921,501 | 0 | 0.00% |

| | | | | |
|---|------|---------------|--------|--------|
| Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3,028,133,505 | 14.60% | 14.60% |
| Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat | 100% | 144,533,605 | 12.20% | 12.20% |
| tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 395,399,900 | 13.49% | 13.49% |
| Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor | 100% | 2,488,200,000 | 14.92% | 14.92% |
| Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 1,522,415,669 | 1.94% | 1.94% |
| Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | 100% | 399,650,000 | 4.27% | 4.27% |
| Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara | 100% | 129,997,160 | 8.39% | 8.39% |
| Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100% | 965,769,250 | 0.00% | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100% | 26,999,259 | 5.60% | 5.60% |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------------|----------|----------|
| Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) | 6.25 % | 22,778,750,383 | ? | ? |
| Persentase Penyediaan Air Baku | 0% | | 0 | 0.00% |
| Rasio Layanan Irigasi (%) | 38.81 % | | 0 | 0.00% |
| Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha) | 3000 | 11,494,147,566 | 0 | 0.00% |
| Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun (Dokumen) | 2 dokumen | 35,837,999 | 0 | 0.00% |
| Jumlah Dokumen Pola dan Rencana PSDA | 1 dokumen | 981,016,980 | 0 | 0.00% |
| Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha) | 0.9 Hektar | 4,478,636,968 | 0 | 0.00% |
| Panjang normalisasi /restorasi/pemeliharaan sungai (Km) | 87 Km | 5,759,999,277 | 0 | 0.00% |
| Jumlah Kelembagaan Pengelola SDA yang dibina dan diberdayakan | 1 Lembaga | 238,656,342 | 0 | 0.00% |
| Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola (Ha) | 2849 Hektar | 11,284,602,817 | 0 | 0.00% |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---|-------|
| Luas jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Ha) | 500 Hektar | 9,990,612,422 | 0 | 0.00% |
| luas jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha) | 663 Hektar | 343,997,474 | 0 | 0.00% |
| Luasan daerah irigasi permukaan yang operasional dan dipelihara (Ha) | 686 Hektar | 399,996,788 | 0 | 0.00% |
| Luas Daerah jaringan irigasi rawa yang Operasional dan di pelihara (Ha) | 1000 Hektar | 249,999,830 | 0 | 0.00% |
| Jumlah lembaga pengelola irigasi yang beoperasional(lembaga) | 1 lembaga | 299,996,303 | 0 | 0.00% |

| | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------|--------------|
| Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | 15.00 | 7,533,062,000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah SR Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | 750 | 7,533,062,000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah sambungan rumah (SR) SPAM yang ditingkatkan (unit) | 750 | 7,533,062,000 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | |
| Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak | 30.00 | 598,720,000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah rumah tangga yang terlayani oleh sistem persampahan regional | 144.00 | 598,720,000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah sarana dan prasarana cubluk untuk pemucuan PHBS (KK) | 144 | 598,720,000 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------|--------------|
| Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%) | 3.80 | 1,198,950,000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah Dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan (dokumen) | 1.15 | 1,198,950,000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah Dokumen penataan bangunan dan lingkungan (dokumen) | 2 | 1,198,950,000 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|--|------------|------------------------|--------------|--------------|
| Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%) | 92% | 105,160,574,193 | 0.00% | 0.00% |
| Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan (Km) | | 105,160,574,193 | 0.00% | 0.00% |
| Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan (Km) | | | 0.00% | 0.00% |
| Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan (Km) | | | 0.00% | 0.00% |
| Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan yang disusun (Dokumen) | 2.00 | 962,311,812 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------|------|-------|
| Panjang Jalan yang terbangun (km) | 850.99 km; 3802.86 m | 310,215,002 | 0.00 | 0.00% |
| Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar (Km) | 7.72 | 38,017,169,357 | 0.00 | 0.00% |
| Panjang jalan yang direhabilitasi (km) | 1.66 | 21,601,200,634 | 0.00 | 0.00% |
| Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala (Km) | 2.58 | 7,416,189,693 | 0.00 | 0.00% |
| Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 850.99 km; 3802.86 m | 28,305,748,517 | 0.00 | 0.00% |
| Panjang jembatan yang diganti (M) | 143 m | 4,591,221,206 | 0.00 | 0.00% |
| Panjang Jembatan Provinsi di Pulau Bangka yang dipelihara (km) | 3793.11 | 3,956,517,972 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|---|------------|----------------------|----------|----------|
| Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | 65% | 1,222,819,285 | 0 | 0 |
| Persentase sertifikasi tenaga ahli | 50.13 % | 978,459,335 | 0 | 0.00% |
| Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih (ORANG) | 60 orang | 978,459,335 | 0.00 | 0.00% |
| Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 100% | 244,359,950 | 0 | 0.00% |
| Jumlah Layanan data dan informasi jasa konstruksi untuk SIPJAKI | 3 layanan | 244,359,950 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------|--------------|
| Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%) | 100% | 2,189,146,293 | ? | ? |
| Jumlah dokumen rencana tata ruang Procinsi yang ditetapkan | 1 dokumen | 1,444,677,959 | 2.06% | 2.06% |
| Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi | 1 dokumen | 1,444,677,959 | 2.06% | 2.06% |
| Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah provinsi | 10 penyeleng garaan | 744,468,334 | 3.16% | 3.16% |
| Jumlah Penyelesaian Pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi | 4 pelanggar an | 456,883,567 | 1.78% | 1.78% |
| Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil koordinasi pelaksanaan penataan ruang | 6 rekomend asi | 287,584,767 | 5.35% | 5.35% |
| | | | | |
| Persentase rumah akibat bencana yang tertangani | 50.00 | 441,089,873 | 0 | 0.00% |
| Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan | 100.00 | 441,089,873 | 0 | 0.00% |

| | | | | |
|---|---------|-------------|------|-------|
| Jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi yang diidentifikasi | 1000.00 | 441,089,873 | 0.00 | 0.00% |
|---|---------|-------------|------|-------|

| | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------|----------|
| Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU | 100.00 | 3,369,709,414 | 0 | 0 |
| Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman | 4.00 | 3,369,709,414 | 0 | 0 |
| Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi | 4 | 3,369,709,414 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|----------|----------|
| Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan | 100% | 806,164,092 | 0 | 0 |
| Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan | 100% | 806,164,092 | 0 | 0 |
| Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 15000 Ha | 806,164,092 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|----------|----------|
| SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD | 100% | 749,991,000 | ? | ? |
| Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum | 100% | 92,919,290 | 0 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%) | 100% | 1,293,304 | 0.00 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (%) | 100% | 23,249,986 | 0.00 | 0.00% |
| Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan (%) | 100% | 20,070,000 | 0.00 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%) | 100% | 48,306,000 | 0.00 | 0.00% |
| Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 | 473,962,530 | 16.56% | 16.56% |
| Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%) | 100% | 2,620,000 | 0.00% | 0.00% |
| tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%) | 100% | 94,342,530 | 21.69% | 21.69% |
| Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%) | 100% | 377,000,000 | 15.38% | 15.38% |
| Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100% | 183,109,180 | 0 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%) | 100% | 113,110,000 | 0.00 | 0.00% |
| Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%) | 100% | 29,999,180 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|---|------|------------|------|-------|
| Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%) | 100% | 40,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|---|------|------------|------|-------|

TOTAL

177,603,639,168

| MARET | | APRIL | | | | | |
|---------------|--------|-------|---|----|---|---|---|
| Rp | % | K | % | Rp | % | K | % |
| 5,824,269,556 | 18.46% | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 36,854,815 | 3.48% | | | | | | |
| 30,864,315 | 4.35% | | | | | | |
| 5,990,500 | 1.71% | | | | | | |
| 5,214,861,502 | 21.64% | | | | | | |
| 5,214,861,502 | 21.66% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| 100,886,764 | 15.12% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| Rp 1,882,000 | 8.06% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| Rp 2,875,000 | 11.50% | | | | | | |
| Rp 8,665,000 | 11.33% | | | | | | |
| Rp 87,464,764 | 18.63% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 442,183,126 | 14.60% | | | | | | |
| 17,627,000 | 12.20% | | | | | | |
| 53,356,126 | 13.49% | | | | | | |
| 371,200,000 | 14.92% | | | | | | |
| 29,483,349 | 1.94% | | | | | | |
| 17,061,349 | 4.27% | | | | | | |
| 10,910,000 | 8.39% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| 1,512,000 | 5.60% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 150,800,000 | 0.66% | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 121,800,000 | 1.06% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| 121,800,000 | 2.11% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| 29,000,000 | 0.26% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| 11,600,000 | 2.90% | | | | | | |
| 11,600,000 | 4.64% | | | | | | |
| 5,800,000 | 1.93% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 496,358,403 | 0.47% | | | | | | |
| 496,358,403 | 0.47% | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| Rp 348,000,000 | 1.23% | | | | | | |
| Rp 2,870,000 | 0.06% | | | | | | |
| Rp 145,488,403 | 3.68% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 28,290,000 | 2.31% | | | | | | |
| 20,380,000 | 2.08% | | | | | | |
| 20,380,000 | 2.08% | | | | | | |
| 7,910,000 | 3.24% | | | | | | |
| 7,910,000 | 3.24% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 53,275,955 | 2.43% | | | | | | |
| 29,736,706 | 2.06% | | | | | | |
| 29,736,706 | 2.06% | | | | | | |
| 23,539,249 | 3.16% | | | | | | |
| 8,150,000 | 1.78% | | | | | | |
| 15,389,249 | 5.35% | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| - | 0.00% | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 3,528,200 | 0.10% | | | | | | |
| 3,528,200 | 0.10% | | | | | | |
| 3,528,200 | 0.10% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 12,072,550 | 1.50% | | | | | | |
| 12,072,550 | 1.50% | | | | | | |
| 12,072,550 | 1.50% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 78,466,320 | 10.46% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| 78,466,320 | 16.56% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| 20,466,320 | 21.69% | | | | | | |
| 58,000,000 | 15.38% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |
| - | 0.00% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| - | 0.00% | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|

6,647,060,984 3.74%

[illegible]

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UKIMAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|